



— INFO KESEJAHTERAAN SOSIAL —

Rapat Koordinasi Dinas Sosial DIY dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-DIY

Optimalkan Aplikasi Manunggal Raharja, Integrasikan Data Kemiskinan

Dinas Sosial DIY bersama dengan dinas sosial kabupaten/kota se-DIY menggelar rapat koordinasi. Berbagai agenda penting dibahas. Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintersih memulai dengan mengupas optimalisasi aplikasi Manunggal Raharja. Yakni aplikasi manajemen validasi unggul berbasis digital dengan rumah data sejahtera masyarakat Jogja.

“MELALUI Manunggal Raharja sudah dilakukan pemeringkatan kemiskinan yang sumber datanya terdiri dari DTKS Maret 2022. Dan data hasil pendaftaran langsung dari kabupaten dan kota,” jelas Endang dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada Rabu (17/5).

Dikatakan, hasil pemeringkatan akan dibagi ke kabupaten/ kota untuk ditindaklanjuti. Endang menyebut masih ada permasalahan. Belum semua dinas sosial kabupaten/kota se-DIY mengirimkan data sesuai dengan format aplikasi.

Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo sudah memanfaatkan aplikasi pendaftaran langsung. Sedangkan Kabupaten Sleman dan Bantul serta Kota Jogja belum. “Sehingga perlu dilakukan penyesuaian formatnya terlebih dahulu,” imbuhnya.

Manunggal Raharja akan terus dikembangkan. Tahun ini akan dilaksanakan integrasi data kemiskinan antara Provinsi dengan kabupaten dan kota. Termasuk inventarisasi penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD DIY dan APBD kabupaten/ kota.



BANYAK AGENDA: Rapat koordinasi Dinas Sosial DIY dengan dinas sosial kabupaten/ kota se-DIY digelar. Masalah yang dibahas antara lain soal integrasi data kemiskinan.

Hal penting lain yang dibahas adalah kegiatan restorasi sosial yang bertujuan menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang tergerus di masyarakat. Dinas Sosial DIY berupaya menumbuhkan kembali nilai-nilai adiluhung yang dimiliki bangsa Indonesia di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

Rapat koordinasi juga membahas pelaksanaan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2023 yang berlangsung Juni mendatang. Termasuk pembahasan berbagai kegiatan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang koordinasinya dilakukan langsung ke kabupaten/kota. Di antaranya distribusi logistik untuk penanganan bencana, keserasian sosial hingga bantuan permakanan untuk PPKS.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo Yohanes Irianta mengatakan, ada kendala saat pengambilan data di lapangan. Begitu ada petugas yang melakukan pendataan, warga langsung berharap dapat bantuan sosial (bansos). “Karena responden sudah mengarah kepada, nanti dapat

bansos, tidak betul seperti itu. Tetap tendensinya adalah bansos. Sehingga betul di Kulonprogo terjadi bahwa masyarakat tidak malu menerima bansos, tidak malu disebut miskin,” jelasnya.

Temuan di lapangan juga terjadi saat proses musyawarah kalurahan. Jajaran pemerintah desa seperti RT, RW dan kepala dusun ada yang seandainya mencoret nama dan mengganti sesuai kriteria yang mereka miliki. Arahnya masih sama, yakni berharap dapat bansos. “Sehingga tetap Manunggal raharja di Kulonprogo kita tunggu dengan pemeringkatan dan nanti sebagai pembanding. Karena di undang-undang semua bansos harus DTKS sebagai panduannya,” ungkapnya.

Rapat koordinasi berjalan dengan lancar. Meski pembahasan sangat serius, namun dikemas dengan santai dan akrab. Sehingga menjadi ruang diskusi yang menyenangkan. Diselingi dengan pantun, karaoke dan paparan serius namun ada kalanya bercanda. Acara itu juga diselenggarakan dalam rangka syawalan. Acara berlangsung di Rumah Makan Mbah Wanto, Berbah Sleman. (lan/kus/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005